

Pengendalian Inflasi Melalui Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Di Indonesia: Perspektif Ekonomi Muslim M. Umer Chapra

Nuzulul¹, Sigit Pramono², Augasta Eka Rasa Putra³,
^{1,2,3} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
Email corespondent: nuzulul@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memahami metode pengendalian inflasi di Indonesia dari sudut pandang Umer Chapra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berdasarkan studi literatur. Informasi dan data yang digunakan dalam artikel ini diambil dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M. Umer Chapra menawarkan pandangan mengenai pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga dan strategi yang tepat. Menurut Chapra, strategi yang efektif untuk menurunkan laju inflasi antara lain dengan memperbaiki moral baik materil maupun spiritual, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan menghilangkan sistem bunga. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya dalam mengembangkan sektor keuangan pada perbankan syariah dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengendalian inflasi dalam jangka panjang.

Kata kunci: Pengendalian Inflasi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Umer Chapra.

1. INTRODUCTION

Kemajuan perekonomian suatu negara secara makro dapat diukur dari stabilitas perekonomiannya yang tercermin pada tingkat inflasi. Inflasi menjadi salah satu tolak ukur utama dalam menilai stabilitas perekonomian karena perubahan angka tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan internasional, daya saing, distribusi pendapatan, dan faktor lainnya. Tingkat inflasi yang tinggi menandakan ketidakstabilan perekonomian suatu negara, sehingga berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, ada hubungan yang signifikan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam situasi ini (Ade Khadijatul Z. HRP et al., 2023).

Inflasi merupakan tantangan perekonomian yang sangat serius dan menjadi ancaman untuk banyak negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kenaikan harga yang terus menerus dapat merusak daya beli masyarakat, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan prioritas utama bagi para pembuat kebijakan ekonomi dan keuangan di seluruh dunia.

Inflasi telah menjadi salah satu masalah utama bagi ekonomi global selama beberapa dekade terakhir. Tidak hanya berdampak pada stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak pada kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dalam domain makroekonomi, inflasi adalah fenomena global yang signifikan. Banyak negara memiliki fokus kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas harga, yang mencakup menjaga stabilitas nilai tukar dan tingkat inflasi rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh inflasi dan menerapkan strategi yang efektif untuk mengatasinya (Gutberlet et al., 2023).

Mayoritas pakar ekonomi makro sepakat bahwa inflasi merupakan salah satu tantangan utama yang masih belum terselesaikan dalam ekonomi pasar saat ini. Inflasi yang tidak terkendali bisa berujung pada krisis keuangan yang mengganggu berbagai aspek, bukan hanya dalam ranah ekonomi, tetapi juga pada bidang sosial dan politik. Inflasi juga dapat menyebabkan ketidakpastian tentang konsumsi dan investasi dalam

jangka waktu sekarang dan masa depan, serta penurunan nilai sebenarnya dari tabungan dan kekayaan. Selain itu, inflasi juga dapat memperburuk kesenjangan pendapatan karena daya beli pekerja menurun tanpa kenaikan upah yang sebanding dengan kenaikan harga barang di pasaran. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan daripada pekerja.

Di negara-negara yang menerapkan sistem moneter ganda, seperti Indonesia, , Pakistan, Malaysia, dan lain sebagainya, otoritas moneter bukan hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga untuk menurunkannya guna mencapai stabilitas ekonomi, stabilitas harga, dan menciptakan keadilan dan pemerataan kemakmuran untuk seluruh rakyat. Karena sebab itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi pemicu inflasi dalam konteks sistem ekonomi konvensional dan juga dalam perspektif Islam. Hal ini penting agar solusi-solusi dapat dirumuskan guna menekan dan mengendalikan tingkat inflasi (Amirotul Nur'Azmi Naqiyya et al., 2023)

Meskipun ada kesamaan di antara perspektif Islam dan konvensional, ada perbedaan dalam pandangan tentang inflasi. Menurut perspektif konvensional, inflasi diartikan sebagai kenaikan suatu harga barang atau jasa yang umum dan berkelanjutan. Pandangan ini mengaitkan inflasi dengan sejumlah variabel, termasuk kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral, permintaan agregat yang melebihi penawaran agregat, dan harapan inflasi. Kebijakan moneter dan fiskal, seperti pengendalian defisit anggaran dan penyesuaian suku bunga, umumnya digunakan untuk mengendalikan inflasi (Amirotul Nur'Azmi Naqiyya et al., 2023)

Inflasi adalah suatu masalah yang disebabkan oleh banyak faktor, dan oleh karena itu, perlu diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Kebijakan moneter dan fiskal harus dikoordinasikan dengan baik dan didukung oleh kebijakan struktural yang tepat untuk menjamin keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang (Umer Chapra, 1985). Umer Chapra (1985) berpendapat bahwa inflasi adalah masalah yang rumit yang disebabkan oleh berbagai faktor dari sisi permintaan dan penawaran. Chapra menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan ketersediaan barang dan jasa di dalam pasar. Selain itu, Chapra juga mengakui bahwa faktor-faktor non-ekonomi seperti kebijakan pemerintah, spekulasi, dan gangguan eksternal memainkan peran penting dalam mendorong inflasi (Umer Chapra, 1985).

Dari sudut pandang Islam, inflasi dipandang sebagai masalah yang disebabkan oleh suatu praktik ekonomi yang tidak adil ataupun ketidakseimbangan dalam distribusi uang, prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat menekankan stabilisasi pada harga serta keadilan sosial, dan mengutamakan dalam mengelola sumber daya yang adil dan transparan dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, solusi untuk pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, penggunaan prinsip bagi hasil sebagai pengganti suku bunga, zakat, dan penerapan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam, yang melarang buku bunga ataupun bunga yang telah ditentukan sebelumnya karena adanya larangan riba dalam hukum Islam, dapat dianggap sebagai solusi alternatif untuk penanganan masalah inflasi.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, Chapra mengusulkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan struktural. Seperti dikutip dalam buku *"Muslim Economic Thinking"*: "Chapra menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup langkah-langkah fiskal, moneter, dan struktural. Dia menganjurkan penggunaan instrumen keuangan Islam, seperti zakat dan pembiayaan berbasis ekuitas, untuk meredam tekanan inflasi dan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan (Umer Chapra, 1985).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan menambah literatur akademis tentang inflasi serta memberikan solusi alternatif untuk mengendalikan masalah inflasi. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa definisi inflasi, faktor-faktor atau penyebab inflasi, dampak inflasi, dan upaya pengendalian inflasi dari perspektif Islam dan konvensional.

2. METHOD

(Furchan & Maimun, 2005) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif-analitik merupakan metode yang fokus pada penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis serta materi bacaan lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Setelah itu, sumber-sumber tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Studi kepustakaan bukan hanya membaca serta mencatat buku ataupun literatur, tetapi juga mengolah data yang ditemukan. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, analisis konten adalah teknik analisis yang mendalam untuk informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Library sesearch atau penelitian kepustakaan ataupun istilah lain untuk penelitian ini. Data yang tertulis, seperti buku, majalah, kitab, artikel jurnal, dan surat kabar, digunakan dalam penelitian kepustakaan. Teknik khusus diperlukan untuk mendapatkan data berkualitas tinggi. Salah satunya adalah teknik penelusuran, yang berarti mengumpulkan informasi dengan membaca buku, jurnal, dan berbagai jenis materi lainnya. Sumber data yang bersifat primer ataupun sekunder digunakan dalam pengumpulan data ini (Nawawi, 1991).

Data primer yaitu informasi yang didapatkan secara langsung dari literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku dan jurnal ekonomi. Mereka dianggap sebagai sumber utama penelitian karena mereka berasal dari literatur yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang membantu penelitian, seperti kitab-kitab dan informasi dari website atau media lain yang membahas topik penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi, di mana peneliti meneliti beberapa kepustakaan. Selanjutnya, untuk mendukung kredibilitas dan validitas penelitian, data yang ditemukan akan dipilah-pilah dengan memprioritaskan karya-karya yang telah diuji kebenarannya (Arikunto, 2011).

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Inflasi Menurut Umer Chapra

M. Umer Chapra, seorang ekonom Islam, yang menyajikan memberikan pandangan unik tentang inflasi dan deflasi dalam sudut pandang ekonomi Islam. Chapra melihat inflasi sebagai suatu fenomena yang sangat berbahaya dan dapat mengancam stabilitas ekonomi, sedangkan deflasi dianggap memperburuk suatu kondisi ekonomi dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menjadi penyebab bertambahnya pengangguran.

Inflasi bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yang menghargai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama, adalah resesi berkepanjangan dan pengangguran. Karena kedua fenomena ini menjadi penyebab kesengsaraan bagi sebagian besar orang dan bertentangan terhadap tujuan kemakmuran ekonomi yang luas, mereka tidak dapat diterima dalam agama Islam. Kemerostan ekonomi yang berkepanjangan juga meningkatkan ketidakpastian dan menghalangi investor untuk mengambil risiko yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang (Umer Chapra, 1985). Dalam

perspektif Islam, mencapai kemaslahatan secara keseluruhan adalah suatu tujuan yang utama, dan oleh karena itu, fenomena-fenomena seperti resesi dan pengangguran harus diatasi dengan upaya-upaya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi (Umer Chapra, 1985).

Menurut Chapra, inflasi terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa lebih banyak jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, yang mendorong harga naik. Untuk melawan inflasi, Chapra menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara jumlah uang yang beredar dan pasokan barang serta jasa. Akan tetapi, Chapra juga mengakui bahwa masalah moneter tidak selalu menjadi satu-satunya penyebab inflasi akan tetapi ada penyebab lain seperti ketidakstabilan politik, perubahan struktural dalam ekonomi, dan variabel eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah global juga dapat berpengaruh.

Dalam hal ini, inflasi menunjukkan bahwa nilai uang tidak lagi menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk mengukur nilai. Akibatnya, uang kehilangan kredibilitasnya sebagai penyimpan nilai yang andal dan sebagai alat tukar yang stabil. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap berbagai orang, secara tidak sengaja menurunkan daya beli uang. Fenomena ini memiliki potensi untuk mengurangi efektivitas sistem moneter dan meningkatkan pengeluaran kesejahteraan sosial. Selain itu, inflasi dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi dan menurunkan tingkat tabungan. Ini akan meningkatkan risiko kesalahan dalam pembentukan modal dan alokasi sumber daya, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan ketidakpastian ekonomi dalam pengambilan keputusan finansial (Umer Chapra, 1985).

M. Umer Chapra menegaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penerapan kebijakan moneter syariah dan kebijakan moneter umum (konvensional), terutama terkait dengan pemilihan sasaran dan alat. Perbedaan utama antara kedua jenis kebijakan tersebut yaitu bahwa hukum Islam melarang baik pembayaran bunga (riba) maupun jaminan nilai nominal (Sukanto and Aisah, 2021).

1. Perbaikan moral: Menekankan tidak hanya dimensi material, tetapi juga dimensi spiritual.

Menurut Umer Chapra, bagian terpenting dari perencanaan Islam untuk mencapai tujuan Islam adalah mengintegrasikan semua anggapan sebagai bagian normal dari aktivitas untuk meningkatkan moralitas individu dan moralitas masyarakat di mana individu tersebut hidup. Tanpa pertumbuhan moralitas seperti itu dalam jiwa manusia, tujuan tidak dapat dicapai, dan mewujudkan kemakmuran manusia sejati juga sulit.

Hanya dengan memenuhi kebutuhan finansial dan spiritual setiap orang serta memastikan bahwa tidak ada yang terabaikan, kemakmuran manusia akan tercapai. Islam menyeru para pengikutnya untuk merawat lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah untuk kebaikan umat manusia. Namun, Islam juga memperingatkan para pengikutnya agar tidak mengabaikan aspek spiritual yang penting dalam kehidupan manusia demi menekankan kekayaan finansial sebagai ukuran utama kemajuan manusia. (Chapra, 1985).

Jika konsep ini diterapkan di Indonesia, maka pemerintah beserta seluruh pemegang kekuasaan diharapkan untuk bekerja sama dalam membangun moralitas masyarakat agar lebih hemat dalam berbelanja. Mereka juga diharapkan memanfaatkan segala yang telah diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan pelayanan kepada manusia (Suhardi and Tambunan, 2022).

2. Pemerataan pendapatan dan kekayaan

Chapra menjelaskan bahwa salah satu aspek terpenting dari pendekatan Islam yaitu bahwa agama itu telah memberikan tata cara dalam mengelola seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini memperkuat keberanian umat untuk mengutarakan kebenaran dan mewujudkan impian yang sangat manusiawi. Jika dikaitkan dengan negara Indonesia, maka bantuan kepada masyarakat yang terdampak inflasi harus dioptimalkan untuk memperbaiki perekonomian. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta dengan membuka lowongan pekerjaan agar inflasi dapat terkontrol (Suhardi and Tambunan, 2022).

Misalnya juga dengan pemerataan pendapatan serta kekayaan. Sesuatu yang diperjuangkan dari semua aspek ekonomi tidak akan tercapai tanpa:

a. Keyakinan akan persaudaraan manusia

Terpenting untuk setiap orang yang mempunyai keyakinan pada satu Tuhan, yang menjadikan seluruh umat sama dan diberi akal, diadili. Suatu sistem sosial ekonomi dimana tidak hanya berdasarkan hukum kelangsungan hidup, tetapi juga secara moral dapat dilakukan penataan kembali masyarakat guna mendorong dan membentuk interaksi sosial-ekonomi yang adil dan kooperatif.

b. Sebuah sistem sosial-politik

Sistem sosial-politik dapat mengatasi ketidakadilan dan eksploitasi dengan berbagai cara, termasuk pencegahan bunga serta mendukung yang lebih lemah secara materi, masyarakat, dan negara. Dalam agama Islam, terdapat kepastian dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, serta menganjurkan pelaksanaan perbuatan baik seperti infaq, zakat, dan shodaqoh. Baitul Mal kemudian secara langsung atau tidak langsung mendistribusikan bantuan kepada fakir miskin untuk membantu meringankan masalah kehidupan orang lain.

c. Penghapusan Riba

Salah satu faktor pembentuk yang dapat harga komoditas meningkat karena adanya faktor produksi yang meningkat yaitu riba. Hal ini dapat menjadi penyebab inflasi. Biaya yang harus dibayarkan konsumen dapat meningkat sebagai akibat dari perubahan tingkat bunga dari sisi permintaan ke dalam komponen harga. Dan hal ini juga dapat merusak kekayaan produsen, pemilik modal, dan konsumen (Naufal, 2019).

Chapra berpendapat bahwa "elemen terpenting dari reformasi sistem keuangan, strategi, dan perbankan (seperti penghapusan riba dan penerapan bagi hasil) didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah." Untuk mencapai tujuan mereka, umat Islam membuat sistem ini berdasarkan keadaan dan posisi relatif mereka. Namun, hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menguji aspek yang lainnya, seperti dukungan terhadap pendekatan syariah. Dukungan harus selalu diperbarui dan meningkat selama proses pengembangan (Umer Chapra, 1985).

Dari perspektif ekonomi Islam, Umer Chapra mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi inflasi, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran didalam perekonomian.
2. Mendorong pertumbuhan output ekonomi dan produktivitas untuk stabilisasi harga dan pengurangan terhadap tekanan inflasi.
3. Mengatur dengan baik sistem keuangan moneter sehingga uang yang beredar dapat dikembalikan dan dikelola secara bijaksana.

Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan bersama.

3.2 Pengendalian Inflasi Di Indonesia

Sama seperti di negara-negara berkembang lainnya, inflasi di Indonesia terutama disebabkan oleh faktor-faktor struktural ekonomi, lebih daripada kebijakan moneter. Oleh karena itu, pengaruh *cost-push inflation* cenderung lebih kuat daripada *demand-pull inflation*. Meskipun pada periode tertentu seperti saat booming minyak, jumlah uang beredar meningkat dan memberikan tekanan pada inflasi di Indonesia, faktor struktural ekonomi tetap berpengaruh. Contohnya, kesenjangan antara penawaran dan permintaan agregat terutama terjadi pada sub-sektor pertanian dan dapat meningkatkan tingkat inflasi. Secara umum, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan moneter untuk mengendalikan tingkat harga secara keseluruhan.

Definisi kebijakan moneter adalah suatu upaya yang diarahkan oleh negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan mengatur sirkulasi uang. Selain mengelola sektor riil, penting juga untuk mengklarifikasi berbagai kesalahpahaman terkait keuangan agar dapat bertahan dari masalah ekonomi yang sedang berlangsung (Latifah, 2015).

Dalam definisi lain, kebijakan moneter merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sentral yang bertujuan untuk mempengaruhi ekonomi makro, dan kemudian diimplementasikan melalui bursa efek. Lebih tepatnya, kebijakan kredit juga dijelaskan sebagai kegiatan makro dari negara atau bank sentral yang berpengaruh terhadap proses pembuatan uang.

M0, M1, dan M2 menunjukkan jumlah uang yang didistribusikan di masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, yang mencakup kestabilan harga dengan tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan dalam produksi riil, dan peningkatan peluang kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mempertahankan kestabilan nilai tukar rupiah sebagai lembaga keuangan sentral.

Kestabilan harga barang dan jasa karena terjadinya inflasi menunjukkan bahwa nilai rupiah stabil. Pada tahun 2005, BI mengeluarkan kebijakannya dengan tujuan spesifik, yaitu mengendalikan inflasi yang diikuti dengan sistem nilai tukar mengambang bebas. Untuk menjaga kestabilan harga dan sistem keuangan, stabilitas nilai tukar sangat penting. Karena hal itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, meskipun tidak dapat sepenuhnya mengendalikan nilai tukar tersebut.

Kebijakan moneter dibuat dengan mempertimbangkan prospek untuk mencapai tujuan inflasi. Apakah inflasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah dasar evaluasi pengaturan kebijakan moneter. Kebijakan sistem moneter juga harus transparan terhadap masyarakat. Secara operasional, definisi tarif kebijakan Bank Indonesia (BI) mencerminkan penetapan kebijakan keuangan. Tarif ini diperkirakan dapat memengaruhi suku bunga di pasar saham, suku bunga pinjaman bank, dan bunga simpanan deposito. Perubahan suku bunga ini kemudian dapat berdampak pada inflasi dan output. Pemerintah dan Bank Indonesia berkolaborasi untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia. Target inflasi untuk tiga tahun ke depan ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

3.3 Relevansi Teori M. Umer Chapra Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia

Dengan menggunakan pendekatan teoretis dan analisis data dari sumber-sumber yang relevan, dapat disimpulkan bahwa teori M. Umer Chapra memiliki makna yang signifikan dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Ini adalah beberapa bukti yang mendukung teori M. Umer Chapra:

1. Pandangan tentang stabilitas harga
Stabilitas harga sangat penting untuk mengendalikan inflasi, pendapat M. Umer Chapra. Dalam hal Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter utama, bertujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah, yang secara langsung berkaitan dengan stabilitas harga.
2. Strategi pengendalian inflasi
Tiga strategi untuk mengendalikan inflasi diusulkan oleh M. Umer Chapra yaitu perbaikan moral, penghapusan riba, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata,. Dalam hal Indonesia, ini dapat diterapkan dengan mengembangkan keuangan dalam perbankan syariah, yang diharapkan dapat menurunkan laju inflasi jangka panjang.
3. Penggunaan instrumen moneter syariah
M. Umer Chapra menekankan betapa pentingnya menggunakan alat moneter Islam untuk mengontrol inflasi. Instrumen moneter syariah seperti SBSN (Sukuk Negara) dapat digunakan untuk mengontrol inflasi di Indonesia, tetapi koordinasi pelaksanaannya masih perlu diperkuat.
4. Kesadaran akan pentingnya koordinasi
M. Umer Chapra menekankan pentingnya koordinasi dalam mengendalikan inflasi. Di Indonesia, koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta antara pemerintah dan bank sentral diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi yang efektif.
5. Penggunaan pendekatan makroekonomi
M. Umer Chapra memiliki latar belakang dalam bidang makroekonomi, yang memungkinkan dia untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan sistematis tentang inflasi dan cara mengendalikannya. Dalam kaitannya dengan Indonesia, pendekatan makroekonomi dapat membantu dalam memahami dan mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural ekonomi Indonesia.

Dalam sintesis, teori M. Umer Chapra memiliki relevansi yang signifikan dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Pandangan-pandangan M. Umer Chapra tentang stabilitas harga, strategi pengendalian inflasi, penggunaan instrumen moneter syariah, kesadaran akan pentingnya koordinasi, dan pendekatan makroekonomi dapat membantu dalam mengendalikan inflasi yang terus meningkat di Indonesia.

4. CONCLUSION

Salah satu indikator yang sangat penting yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara adalah inflasi. Dari diskusi sebelumnya, diketahui bahwa Umer Chapra menyarankan beberapa cara untuk mengendalikan inflasi, termasuk stabilitas harga, peningkatan moral material dan spiritual, penghapusan sistem bunga (riba), dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi riil digunakan untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Pengembangan perbankan syariah dengan fokus pada penghapusan sistem bunga adalah salah satu hasil dari upaya-upaya ini. Untuk menjaga keseimbangan moneter, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan sasaran untuk aset Bank Syariah Indonesia.

5. REFERENCES

The 1st International Conference on Islamic Economics (ICIE) 2024

- Ade Khadijatul Z. HRP, M. Shabri Abd. Majid, & Rahmat. (2023). Islamic Macro Economy: A New Paradigm. *International Journal of Economics (IJE)*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.101>
- Amirotul Nur'Azmi Naqiyya, Nuril Hidayati, Shinta Eka Widamayanti, & Suryadini Diyah Marwati. (2023). Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar*, 7(1), 50–65. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.637>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev. V). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760>
- Furchan, A., & Maimun, A. (2005). *Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Pustaka Pelajar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=406197>
- Gutberlet, M., Preuss, L., & Thorpe, A. S. (2023). Macro level matters: Advancing Circular Economy In Different Business Systems Within Europe. *Ecological Economics*, Volume 211. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800923001210>
- Nawawi, H. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=236354>
- Umer Chapra, M. (1985). Towards a just monetary system : a discussion of money, banking and monetary policy in the light of Islamic teachings. In *JKAU: Islamic Econ* (Vol. 2, Issue 1). The Islamic Foundation.